

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran merupakan salah satu jenis bencana yang kerap terjadi diberbagai wilayah, baik di lingkungan pemukiman, sarana publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun kawasan industri. Kebakaran merupakan kejadian yang mengakibatkan kerugian berupa nyawa atau harta benda serta dapat terjadi dimana saja. Dampak yang ditimbulkannya tidak hanya berupa kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa manusia.¹

Peristiwa kebakaran, secara tidak langsung dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan disekitarnya baik pada makhluk hidup seperti manusia dan hewan, serta harta benda dan bangunan di sekitarnya yang dapat ikut terbakar,² bangunan tersebut dapat berupa pemukiman atau bahkan fasilitas umum. Kehilangan harta dan jiwa yang diakibatkan oleh tidak terkendalinya api sudah banyak terjadi, dan sudah banyak pula upaya yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebakaran dapat terjadi dan bagaimana pola penjalaran apinya terjadi, serta cara untuk mencegah agar api tersebut tidak membesar. Bahaya dari bencana kebakaran dapat terjadi setiap saat, karena banyak peluang yang dapat memicu terjadinya kebakaran.

¹ Nita Amalia Putri, "Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran" 05 (2019): 59–69.

² Cahyadi Setiawan, Dwi Sukanti Lestariningsih, and Elisabeth Nugrahaeni Prananingrum, "The Impact Sosialization of Fire Disaster Mitigation to Increasing Student' s Knowledge at Muttaqien Junior High School Dampak Sosialisasi Mitigasi Bencana Kebakaran Terhadap Peningkatan Pengetahuan Siswa Di SMP Muttaqien" 8, no. 1 (2024): 175–81.

Kondisi ini menegaskan bahwa kebakaran adalah masalah serius yang membutuhkan penanganan profesional, terstruktur, dan responsif dari lembaga pemadam kebakaran. Kebakaran biasanya menyebabkan kerusakan properti atau kehancuran properti dan cedera atau kematian manusia. Oleh karenanya, kesiapan dalam menghadapi kebakaran harus dipahami setiap individu karena keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama.³

Dibanyak daerah, termasuk wilayah padat penduduk, angka kejadian kebakaran menunjukkan kecenderungan yang signifikan. Faktor pemicunya beragam, mulai dari kelalaian manusia, korsleting listrik, penggunaan bahan bakar yang tidak aman, hingga kondisi lingkungan fisik yang rentan terhadap penyebaran api.⁴ Hal ini menambah urgensi keberadaan lembaga pemadam kebakaran sebagai garda terdepan dalam upaya perlindungan publik terhadap ancaman bahaya kebakaran.

Dalam penyelamatan dan evakuasi kebakaran proses harus dilakukan segera dengan waktu respons cepat dan tanggap selama dan setelah operasi kebakaran, bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan mereka yang terdampak kebakaran termasuk dalam kegiatan pemadaman, pengendalian dan penyelamatan serta evakuasi. Dalam hal ini Pemadam kebakaran dituntut harus menunjukan pelayanan yang prima dalam melayani

³ Vita Mardhiyanti Melati et al., "Analisis Risiko Penyebab Kebakaran Di Museum Ranggawarsita Dengan Metode Loss Causation Model," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 4 (2020): 504–10.

⁴ Hulu Fatya, Ilhansyah Putra Fatya, and Muslim Muslim, "Mitigasi Bencana Kebakaran Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur" (IPDN, 2025).

kepentingan masyarakat. Organisasi ini harus siap 24 jam penuh melayani kepentingan masyarakat, karena bahaya yang ditimbulkan tidak dapat terduga kapan dan dimana kejadian kebakaran terjadi. Sebagaimana kebijakan bahwa Keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dituntut mempunyai kinerja yang tinggi didalam melakukan penanganan kebakaran dan penyelamatan dan kondisi demikian diperlukan kepedulian pemberi pelayanan publik terhadap masyarakat yang diharapkan akan memberikan layanan prima kepada Masyarakat.⁵ Berdasarkan data dari Bidang Penanggulangan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara, peristiwa kebakaran yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara pada 5 (lima) tahun terakhir di lampirkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Peristiwa Kebakaran 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah
1	2025	27
2	2024	24
3	2023	19
4	2022	21
5	2021	17

Sumber: Bidang Penanggulangan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara

Peran lembaga pemadam kebakaran dalam konteks tersebut tidak hanya terbatas pada pemadaman api. Tugas mereka meliputi penyelamatan

⁵ Meri Gustina, Diga Putri Oktaviane, and Wahib Assyahri, “Analisis Kualitas Pelayanan Pada Aspek Tangible Dan Reliability Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bukittinggi” 3, no. 2 (2025): 73–79.

korban, pengamanan lingkungan, penanggulangan bahan berbahaya, serta penyediaan edukasi tentang pencegahan kebakaran kepada Masyarakat.⁶ Dengan demikian, lembaga ini memiliki mandat strategis untuk melindungi jiwa dan harta masyarakat secara langsung.

Pemadam kebakaran adalah profesi yang sangat mulia dan penuh tantangan. Mereka adalah garda terdepan dalam melindungi nyawa dan harta benda masyarakat dari ancaman kebakaran. Tugas mereka tidak hanya sebatas memadamkan api yang berkobar, tetapi juga melibatkan berbagai tindakan penyelamatan, pencegahan, dan penanganan situasi darurat yang kompleks. Tentunya dalam pelaksanaan tugas terdapat nilai-nilai yang memiliki makna yakni nilai kemanusiaan, profesionalisme, integritas dan kepedulian sosial.⁷

Dalam prinsip - prinsip keselamatan publik, pemadam kebakaran merupakan institusi vital untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Keberhasilan mereka dalam menangani kebakaran tidak hanya menyelamatkan harta benda namun juga mencegah terjadinya korban jiwa yang lebih besar. Peran ini menjadi semakin penting ketika kebakaran berpotensi merembet ke permukiman luas atau fasilitas kritis.

Berdasarkan prinsip Fiqh Siyasah tersebut, keberadaan lembaga pemadam kebakaran tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan sosial modern, tetapi juga sebagai bagian dari amanah syariat dalam upaya menjaga

⁶ Syekh Mochsin, "Peran Bidang Pemadam Kebakaran," *Fokus: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21, No. 1 (2023).

⁷ H Sucipto And M Si, *Satria Biru Sipiakluk Sijago Merah* (Lenggo Geni Pustaka, 2026).

keselamatan umat. Ini memberikan dasar normatif yang kuat bahwa aktivitas pemadam kebakaran selaras dengan prinsip-prinsip Islam.⁸

Dalam konteks pengelolaan negara, Islam memberikan perhatian besar pada pemeliharaan kemaslahatan publik. Perlindungan terhadap hak-hak setiap individu dalam Islam merupakan persoalan yang sangat krusial, bahwa negara berkewajiban menyediakan fasilitas publik, hak untuk memperoleh fasilitas umum yang baik. Negara wajib memberikan dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas publik lainnya yang layak dan dapat digunakan untuk kepentingan seluruh warga negara seperti keamanan, layanan sosial, dan penanggulangan bencana demi kesejahteraan masyarakat.⁹ Pemadam kebakaran termasuk dalam kategori ini.

Dari sudut pandang Fiqh Siyash, peran pemerintah dalam melindungi rakyat sangat tegas. Pemerintah bertugas menciptakan keamanan, menetapkan kebijakan publik yang adil, dan memastikan bahwa seluruh sektor yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat dikelola secara amanah dan profesional. Ibnu Taimiyyah menekankan bahwa pemimpin adalah penjaga bagi rakyatnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan urusan tersebut.¹⁰

⁸ M. Husamuddin, M. Z., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, "Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Darūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern.," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 254.

⁹ Muhammad Amin, "Perlindungan Hak Warga Negara dalam Prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Konstitusi," 8.1 (2023), 19–33 (hal. 29–30).

¹⁰ Ahmadi, Alhamdani, and Sukti. Surya, "Konsep Negara Dan Kepemimpinan Dalam Pemikiran Politik Islam Ibnu Taimiyah" 4, no. 3 (2024): 6.

Oleh karena itu, menganalisis strategi pemadam kebakaran melalui prinsip - prinsip Fiqh Siyasah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pemerintah telah memenuhi tanggung jawab syar'i dalam melindungi jiwa dan harta warga negara. Analisis ini tidak hanya melihat aspek teknis pemadaman, tetapi juga kebijakan, manajemen kelembagaan, anggaran, dan distribusi layanan. Selain itu, strategi pemadam kebakaran perlu mencakup sistem mitigasi yang kuat, edukasi masyarakat, serta penegakan regulasi terkait keselamatan bangunan dan lingkungan. Dalam kerangka Fiqh Siyasah, kebijakan tersebut harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*) dan pencegahan bahaya (*dar' al-mafāsīd*).¹¹

Seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya kompleksitas risiko kebakaran, lembaga pemadam kebakaran perlu mengadopsi pendekatan strategis yang adaptif dan profesional. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas petugas, pembaruan peralatan, serta sistem komunikasi yang efektif. Semua komponen ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menyediakan pelayanan publik yang aman dan berkualitas.

Dalam konteks penegakan hukum, pemerintah juga telah mengatur standar minimal pelayanan pemadam kebakaran melalui kebijakan nasional seperti Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Subbidang Kebakaran, pengaturan sub-bidang kebakaran diatur lebih

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2018, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan menetapkan standar teknisnya.¹² Sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran harus dilakukan segera dengan waktu respons selama dan setelah operasi kebakaran bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan mereka yang terdampak kebakaran termasuk dalam kegiatan pemadaman, pengendalian dan penyelamatan dan evakuasi.¹³

Regulasi ini menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan perlindungan yang layak dari ancaman kebakaran.¹⁴ Namun, implementasi di lapangan tidak selalu optimal. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, kekurangan armada, dan kondisi geografis seringkali menghambat efektifitas pemadam kebakaran. Karena itu, analisis strategis berbasis nilai-nilai Fiqh Siyasah dapat memberikan arah evaluatif dan normatif bagi peningkatan layanan.

¹² Menteri Dalam negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota," 2018, 167–86.

¹³ Vika Rianggi Putri, Wirid Winduro, dan Damayanti Suhita, "Implementasi Permendagri No 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Solidaritas Fisip Unisri*, 7.2 (2023), 1–10 (hal. 1).

¹⁴ Pemerintah, "Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal," 2018, 14.

Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara prinsip-prinsip syariat Islam dan kebutuhan praktis dalam manajemen kebakaran. Dengan demikian, lembaga dan kebakaran dapat menjalankan perannya tidak hanya sebagai institusi teknis, tetapi juga sebagai pelaksana amanah publik yang menjunjung nilai moral dan kemanusiaan.

Kebijakan pemadam kebakaran yang komprehensif memadukan mitigasi, edukasi, dan penegakan regulasi. Dalam kerangka *siyasah dusturiyah* (kebijakan tata negara Islam), langkah ini adalah wujud nyata dari kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kebaikan). Sehingga memprioritaskan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sesuai dengan tujuan dari hukum islam tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam peran pemadam kebakaran serta menelaah strategi mereka dari sudut pandang Fiqh Siyasah, guna memastikan bahwa pelayanan publik ini berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan jiwa, perlindungan harta, dan kemaslahatan umum sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian berjudul “*Analisis Prinsip - Prinsip Fiqh Siyasah Terhadap Perlindungan Jiwa dan Harta Korban Kebakaran (Studi Kasus di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara)*” menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara strategi

pelayanan pemadam kebakaran, tanggung jawab pemerintah daerah, dan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan umat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan kebakaran.
2. Kurangnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Akses dan infrastruktur wilayah yang tidak mendukung operasional pemadaman.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
5. Kurangnya analisis strategis pelayanan pemadaman kebakaran berbasis nilai-nilai Fiqh Siyasah.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya difokuskan pada strategi pelayanan Bidang Penanggulangan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya melindungi jiwa dan harta masyarakat dari ancaman kebakaran. Adapun pembahasan dibatasi pada analisis strategis dan kebijakan pelayanan, bukan aspek teknis operasional pemadaman. Prinsip - prinsip Islam juga difokuskan pada prinsip-prinsip Fiqh Siyasah yang relevan dengan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu

prinsip *masalah*, musyawarah, amanah, dan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan wilayah kajian dibatasi pada lingkup administratif Kabupaten Bengkulu Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi pemadam kebakaran dalam pencegahan, penanggulangan, dan mitigasi korban kebakaran di Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana prinsip - prinsip fiqh siyasah pemadam kebakaran dalam pencegahan, penanggulangan, dan mitigasi korban kebakaran di Kabupaten Bengkulu Utara?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh Bidang Penanggulangan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya perlindungan jiwa dan harta masyarakat.
2. Mengevaluasi efektivitas strategi pemadaman, penyelamatan, pencegahan, dan mitigasi kebakaran berdasarkan kondisi empiris di lapangan.

3. Menganalisis strategi pelayanan pemadam kebakaran dalam prinsip - prinsip Fiqh Siyasah, khususnya terkait prinsip kemaslahatan, perlindungan jiwa dan perlindungan harta.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis (pengembangan kajian *fiyāsah* dalam administrasi publik) dan manfaat praktis (masukan bagi Bidang Penanggulangan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam:

- a. Pengembangan kajian Fiqh Siyasah dalam konteks administrasi publik, terutama terkait bagaimana prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dapat diterapkan pada sektor pelayanan publik modern seperti pemadam kebakaran sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.
- b. Memperkaya literatur akademik mengenai integrasi antara kajian Fiqh Siyasah dusturiyah, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan manajemen layanan publik, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara nilai-nilai syariat Islam dengan tata kelola pelayanan masyarakat.
- c. Menghadirkan model konseptual baru terkait strategi pelayanan publik berbasis Fiqh Siyasah, yang dapat digunakan dalam pengembangan

teori dan kerangka analisis dalam penelitian administrasi publik berbasis nilai-nilai Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak terkait, terutama:

- a. Memberikan masukan konstruktif bagi Bidang Penanggulangan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara terkait peningkatan strategi penanggulangan kebakaran, baik dari sisi pencegahan, respons, maupun mitigasi, berdasarkan temuan penelitian di lapangan.
- b. Menjadi dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah untuk merumuskan kebijakan pelayanan pemadam kebakaran yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
- c. Mendorong peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan melalui model strategi yang ideal, sehingga layanan pemadam kebakaran dapat lebih optimal dalam melindungi jiwa dan harta masyarakat.
- d. Memberikan prinsip - prinsip tambahan berbasis Fiqh Siyasah yang dapat digunakan dalam pelatihan, pengembangan kompetensi, atau penyusunan standar operasional bagi aparaturnya pemadam kebakaran.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat dasar teori dan menjelaskan letak penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya, penulis melakukan kajian beberapa penelitian yang sudah ada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi pelayanan Bidang Penanggulangan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah diteliti sebelumnya, serta menunjukkan bagian yang baru (*novelty*) dari penelitian ini dari sudut hukum positif dan prinsip - prinsip Fiqh Siyasah. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan antara lain:

1. Tesis yang berjudul “Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau”, yang ditulis oleh Jebril Al Syanur di Universitas Islam Riau (2019). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tesis ini membahas tentang strategi Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar mengeksplor fenomena kapabilitas bidang pemadam kebakaran dalam penanganan penanggulangan kebakaran.¹⁵
2. Tesis yang berjudul “Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir” yang ditulis oleh Rahmad

¹⁵ Jebril Al Syanur, “Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Kebakaran Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau” (Universitas Islam Riau, 2019).

Hadi (2022).¹⁶ Jenis penelitian ini dianalisis secara deduktif, dengan pembahasan secara kualitatif. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir serta dikaitkan dengan pelayanan dasar penanggulangan bencana kebakaran.

3. Tesis yang berjudul “Pencegahan Resiko Kebakaran Gedung : Peran dan Tindakan Pusat Layanan Kebakaran dan Pertolongan *Département Rhone*” yang ditulis oleh Muhadi (2008). Penelitian ini didasarkan pada studi literatur dan pengamatan di lapangan. Penulis dalam tesis ini bertujuan untuk memahami lebih dekat bagaimana aktivitas Pusat Layanan Kebakaran dan Pertolongan *Département (SDIS) Rhône*, khususnya dalam menangani perizinan mendirikan bangunan dan proses pengawasannya di lapangan dan bagaimana pencegahan yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Pertolongan *Département Rhône* dalam mengurangi jumlah kasus kebakaran dalam bangunan.¹⁷

¹⁶ Rahmad Hadi, “Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir” (Universitas Islam Riau, 2022).

¹⁷ Muhadi Muhadi, “Pencegahan Resiko Kebakaran Gedung: Peran Dan Tindakan Pusat Layanan Kebakaran Dan Pertolongan *Département Rhone*” (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008).

4. Tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang ditulis oleh Muhammad Arba’in (2022).¹⁸ Penelitian ini didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penulis dalam tesis ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dikaitkan dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
5. Tesis yang berjudul “Evaluasi Kesiapan Lingkungan Kerja Dalam Menghadapi Bahaya Kebakaran menurut Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Gedung Rektorat dan Gedung UPT Perpustakaan Universitas Lampung”. Penelitian ini didasarkan pada metode observasional (non eksperimental) deskriptif. Penulis dalam tesis ini bertujuan untuk melihat sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terutama Gedung Rektorat dan Gedung UPT

¹⁸ Muhammad Arba’in, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (Universitas Islam Riau, 2022).

Perpustakaan Universitas Lampung beserta faktor – faktor yang menghambat dalam aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).¹⁹

6. Artikel yang berjudul “Evaluasi Sistem Penanggulangan Tanggap Darurat Kebakaran di PT Ossiana Sakti Ekamaju” yang ditulis oleh Eddy Sutomo,dkk.²⁰ Penelitian ini difokuskan untuk melakukan penelitian pada Organisasi Tanggap Darurat, Prosedur Tanggap Darurat, dan Dokumen Pelatihan Tanggap Darurat pada PT. Ossiana Sakti Ekamaju Balikpapan. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk mendeskripsikan hasil yang diperoleh disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kesesuaian sistem tanggap darurat kebakaran mendapatkan 44%. Dapat ditarik kesimpulan kesesuaian pada sistem tanggap darurat kebakaran PT. Ossiana Sakti Ekamaju Balikpapan masuk dalam kategori “KURANG”.
7. Artikel dengan judul “Problematika Pembelajaran Fiqih di kelas IV MIS Darul Ihsan Sepinggian Pasca Kebakaran Tahun Pelajaran 2022/2023”. Penelitian dalam artikel ini ditulis oleh Tiara Nur Afni dengan tujuan mengetahui proses pembelajaran, problematika pembelajaran, dan upaya

¹⁹ Almo Prasesa Siregar, “Evaluasi Kesiapan Lingkungan Kerja Dalam Menghadapi Bahaya Kebakaran Menurut Aspek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Gedung Rektorat Dan Gedung Upt Perpustakaan Universitas Lampung” (Universitas Lampung, 2016).

²⁰ Eddy Sutomo et al., “Evaluasi Sistem Penanggulangan Tanggap Darurat Kebakaran Di PT Ossiana Sakti Ekamaju,” *Identifikasi* 9, no. 2 (2023): 797–801.

yang dilakukan guru. Adapun hasil dalam artikel ini mencakup proses pembelajaran menggunakan perencanaan yang matang pasca kebakaran dengan cara memberikan hapalan, pengalaman berupa praktek dan pembiasaan berupa pengamalan.²¹

Perbedaan tesis yang penulis teliti dengan tesis – tesis dari penelitian terdahulu adalah penulis berusaha menganalisis proses keseluruhan dalam suatu kejadian kebakaran, baik pra kebakaran, saat terjadinya kebakaran, maupun pasca kebakaran sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal dalam penyelamatan jiwa dan harta korban kebakaran dikaitkan dengan prinsip – prinsip Fiqh Siyasah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yang masing – masing bab ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai tesis ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang membahas tentang strategi pemadam kebakaran dalam perlindungan jiwa dan harta korban kebakaran dalam prespektif Fiqh Siyasah.

²¹ Tiara Nur Afni Afni, “Problematisasi Pembelajaran Fiqih Di Kelas Iv Mis Darul Ihsan Sepinggian Pasca Kebakaran Tahun Pelajaran 2022/2023,” *Lunggi Journal* 2, no. 2 (2024): 297–306.

BAB III Metode Penelitian yang akan menjelaskan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, teknik penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan tentang strategi pemadaman kebakaran dalam pencegahan, penanggulangan, dan mitigasi kebakaran dalam perlindungan jiwa dan harta korban kebakaran di Kabupaten Bengkulu Utara dikaitkan dalam prinsip - prinsip Fiqh Siyasah.

BAB V Penutup, terdiri atas kesimpulan hasil penelitian serta saran yang bertujuan untuk memberikan masukan agar proses pencegahan, penanggulangan, dan mitigasi kebakaran dalam perlindungan jiwa dan harta korban kebakaran di Kabupaten Bengkulu Utara menjadi semakin baik dan berjalan secara maksimal.

